

1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum, dengan fokus:
 - a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik
 - b. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
 - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus:
 - a. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
 - b. Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan
 - c. Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga
 - d. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Perekonomian Daerah
 - b. Peningkatan kepariwisataan daerah
4. Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - b. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
 - b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Peningkatan Kesetaraan Gender.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang termuat dalam dokumen APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2015 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang pada hakekatnya tidak memberatkan masyarakat, karena apabila kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut berlebihan akan menghambat investasi yang imbasnya pada semakin banyaknya pengangguran.

Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2015 pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dan terus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan upaya yang berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya seperti :

1. Perda Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.

Disisi lain dalam rangka pengembangan Pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya terkait dengan Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan ke-SAMSAT-an dalam Provinsi Jambi, bahwa mitra kerja yang ikut mendukung dalam kegiatan dimaksud adalah Polda Jambi beserta Jajarannya, PT.Jasa Raharja dan Bank Jambi.

Beberapa upaya yang telah dan akan dikembangkan dimasa datang terkait dengan kegiatan ke-SAMSAT-an antara lain meliputi :

1. Samsat Link di 10 UPTD pada Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi yaitu Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tidak tergantung domisili/KTP, pemilik bebas melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Jambi.
2. Samsat Drive Thru yaitu Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK yang dapat dilakukan wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
3. Samsat Gerai WTC dan Jamtos yaitu Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK di Mall WTC dan

Jamtos, sehingga sambil berbelanjapun masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraannya.

4. Samsat Keliling yaitu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK menggunakan mobil Samsat Keliling yang telah disediakan pada masing-masing UPTD pada Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi, sehingga bisa menjangkau ke pelosok-pelosok daerah.
5. Untuk mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat Dinas Pendapatan Provinsi Jambi juga telah membuka Pos Pelayanan Pembantu pembayaran Pajak pada masing-masing UPTD pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi terdiri dari :
 - a. UPTD Kota Jambi :
 - 1) Samsat Induk Jl. Gajah Mada Jelutung Kota Jambi;
 - 2) Samsat DriveThru;
 - 3) Samsat Gerai WTC;
 - 4) Samsat Gerai Jamtos;
 - 5) Mobil Samsat Keliling Online.
 - b. UPTD Kabupaten Batang Hari :
 - 1) Samsat Induk Jl. Gajah Mada Ma. Bulian;
 - 2) Pos Pelayanan Pembantu Kec. Pelayung;
 - 3) Pos Pelayanan Pembantu Kec. Bajubang;
 - 4) Pos Pelayanan Pembantu Desa Bathin;
 - 5) Pos Pelayanan Pembantu Kec. Mersam;
 - 6) Mobil Samsat Keliling Online 2 (dua) unit.
 - c. UPTD Kabupaten Muaro Jambi :
 - 1) Samsat Induk Jl. Cinto Kenang Sengeti Muaro Jambi;
 - 2) Pos Pelayanan Kec. Sei. Bahar;
 - 3) Pos Pelayanan Sei. Gelam;
 - 4) Pos Pelayanan Sp. Tempino;
 - 5) Pos Pelayanan Kumpe;
 - 6) Pos Pelayanan Jaluko
 - 7) Pos Pelayanan Pembantu Bahar Utara;
 - 8) Pos Pelayanan Pembantu Suak Kandis;
 - 9) Pos Pelayanan Pembantu Kademangan;

- 10) Pos Pelayanan Pembantu Teluk Raya;
 - 11) Mobil Samsat Keliling Online.
- d. UPTD Kabupaten Merangin :
- 1) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Rantau Panjang;
 - 2) Pos Pelayanan Pemenang;
 - 3) Pos Pelayanan Pembantu Sungai Manau;
 - 4) Pos Pelayanan Pembantu Kecamatan Siau;
 - 5) Mobil Samsat Keliling Online.
- e. UPTD Kabupaten Kerinci :
- 1) Samsat Induk Semurup;
 - 2) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Kayu Aro Timur;
 - 3) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Sungai Penuh;
 - 4) Pos Pelayanan Pembantu Kecamatan Lempur dan Pasar Garman;
 - 5) Pos Pelayanan Pembantu Kecamatan Temiai;
 - 6) Pos Pelayanan Pembantu Desa Pulau Sangkar;
 - 7) Mobil Samsat Keliling Online 2 Unit.
- f. UPTD Kabupaten Bungo :
- 1) Samsat Induk Kota Bungo;
 - 2) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Kuamang Kuning
 - 3) Pos Pelayanan Tanah Tumbuh;
 - 4) Pos Pelayanan Tanah Sepenggall Lubuk Landai;
 - 5) Pos Pelayanan Jujuhan;
 - 6) Mobil Samsat Keliling Online.
- g. UPTD Kabupaten Tanjab Barat :
- 1) Samsat Induk Kota Kuala Tungkal;
 - 2) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Merlung;
 - 3) Pos Pelayanan Pembantu Purwodadi;
 - 4) Pos Pelayanan Pembantu Teluk Nilau;
 - 5) Mobil Samsat Keliling Online.
- h. UPTD Kabupaten Sarolangun :
- 1) Samsat Induk Sarolangun, Bernai;
 - 2) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Mandiangin;
 - 3) Pos Pelayanan Pembantu Kecamatan Singkut;

- 4) Mobil Samsat Keliling Online.
- i. UPTD Kabupaten Tebo :
 - 1) Samsat Induk Tebo Paal 12;
 - 2) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Rimbo Bujangl
 - 3) Mobil Samsat Keliling Online.
- j. UPTD Kabupaten Tanjung Jabung Timur :
 - 1) Samsat Induk Tanjab Timur, Nibung;
 - 2) Samsat Pelayanan Pembantu Kecamatan Rantau Rasau;
 - 3) Mobil Samsat Keliling Online.
- k. Razia terpadu bersama jajaran Ditlantas Polda Jambi dan PT. Jasa Raharja Jambi disetiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan sasaran :
 - 1) Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Provinsi Jambi untuk menjaring BBN II (untuk dimutasikan ke Nomor Polisi Provinsi Jambi/BH);
 - 2) Menjaring kendaraan yang telah berakhir masa jatuh tempo pembayaran pajak;
 - 3) Melaksanakan penyuluhan dan penagihan pajak, retribusi kepada wajib pajak langsung dan melalui media cetak dan elektronik maupun pemasangan baleho.

Dengan tetap menjalankan kebijakan sebagaimana tersebut, maka untuk menjaga kesinambungan peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2015, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi :

- 1) Melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- 2) Melakukan updating data sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;
- 4) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN-KB di wilayah masing-masing,

dengan harapan akan berdampak terhadap peningkatan bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2015 hanya terealisasi 96,21 persen dari target yang ditetapkan, realisasi tersebut juga lebih rendah dari tahun 2014 sebesar (1,33) persen. Tidak tercapainya target pendapatan dimaksud disebabkan oleh belum diterimanya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat dan tidak tercapainya target pendapatan dai pajak daerah.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 39,61 persen dari total pendapatan, Dana Perimbangan dengan kontribusi pendapatan sebesar 45,25 persen dan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 15,14 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** di bawah ini.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015

URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	2014	2015 *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	3.165.055.792.535,44	3.135.952.888.932,90	(42.136.059.247,86)	(1,33)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.281.239.472.808,44	1.242.250.309.352,90	(38.989.163.455,54)	(3,04)
Pendapatan Pajak Daerah	1.010.560.585.180,50	1.010.318.979.969,00	(241.605.211,50)	(0,02)
Hasil Retribusi Daerah	14.587.180.553,00	19.336.663.877,00	4.749.483.324,00	32,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	32.219.308.736,00	34.943.073.702,75	2.723.764.966,75	8,45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.872.398.338,94	177.651.591.804,15	(46.220.806.534,79)	(20,65)
DANA PERIMBANGAN	1.514.518.389.008,00	1.419.079.798.364,00	(108.471.746.289,32)	(7,16)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	516.825.167.008,00	351.969.164.364,00	(164.856.002.644,00)	(31,90)
Dana Alokasi Umum	948.337.712.000,00	1.009.165.864.000,00	60.828.152.000,00	6,41
Dana Alokasi Khusus	49.355.510.000,00	57.944.770.000,00	8.589.260.000,00	17,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	369.297.930.719,00	474.622.781.216,00	105.324.850.497,00	28,52
Pendapatan Hibah	1.390.995.719,00	6.651.030.716,00	5.260.034.997,00	378,15
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	367.906.935.000,00	467.971.750.500,00	100.064.815.500,00	27,20

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 telah mencapai Rp1.242.250.309.352,90 atau sebesar 99,09 persen dari target yang ditetapkan, jumlah tersebut juga lebih rendah dari realisasi tahun 2014

sejumlah Rp38.989.163.455,54 atau berkurang 3,04 persen, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah yang merupakan komponen utama PAD hanya terealisasi Rp1.010.318.979.969,00 atau setara dengan 96,05 persen dari target yang telah ditetapkan, tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sehingga berpengaruh terhadap target pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang hanya mencapai Rp270.301.438.650,00 atau setara dengan 80,80 persen, secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah	1.051.871.850.000,00	1.010.318.979.969,00	(41.552.870.031,00)	96,05
Pajak Kendaraan Bermotor	319.000.000.000,00	321.804.013.917,00	2.804.013.917,00	100,88
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	118.639.228.667,94	130.668.123.318,00	12.028.894.650,06	110,14
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2.665.809.674,17	555.184.150,00	(2.110.625.524,17)	20,83
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	704.896.040,88	631.649.550,00	(73.246.490,88)	89,61
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	805.866.247,33	479.421.500,00	(326.444.747,33)	59,49
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	44.470.557.601,02	74.357.111.800,00	29.886.554.198,98	167,21
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	47.375.424.883,82	22.592.859.164,00	(24.782.565.719,82)	47,69
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	920.746.080,00	656.301.735,00	(264.444.345,00)	71,28
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	252.397.500,00	0,00	(252.397.500,00)	0,00
E. Sepeda Motor	103.165.073.304,84	91.855.573.950,00	(11.309.499.354,84)	89,04
F Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air	0,00	7.788.750,00	7.788.750,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	334.524.600.000,00	270.301.438.650,00	(64.223.161.350,00)	80,80
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	103.712.415.500,00	96.476.798.250,00	(7.235.617.250,00)	93,02
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	668.398.800,00	394.123.100,00	(274.275.700,00)	58,97
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.024.995.300,00	727.054.900,00	(297.940.400,00)	70,93
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	175.929.600,00	49.685.000,00	(126.244.600,00)	28,24
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	58.004.766.800,00	36.786.641.600,00	(21.218.125.200,00)	63,42
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	38.503.337.200,00	27.817.449.200,00	(10.685.888.000,00)	72,25
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	328.547.175,00	97.502.200,00	(231.044.975,00)	29,68
E. Sepeda Motor	132.106.209.625,00	107.952.184.400,00	(24.154.025.225,00)	81,72
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	260.057.570.000,00	282.231.166.893,00	22.173.596.893,00	108,53
Premium	121.463.613.156,00	137.095.578.476,00	15.631.965.320,00	112,87
Pertamax	36.135.731.274,00	7.164.197.925,00	(28.971.533.349,00)	19,83
Pertamax Plus	0,00	275.198.933,00	275.198.933,00	0,00
Solar	102.458.225.570,00	137.696.191.559,00	35.237.965.989,00	134,39
Pajak Air Permukaan	1.273.680.000,00	1.209.826.550,00	(63.853.450,00)	94,99
Pajak Rokok	137.016.000.000,00	134.772.533.959,00	(2.243.466.041,00)	98,36

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2015 telah terealisasi sejumlah Rp19.336.633.877,00 atau setara dengan 102,70 persen, pelampauan target tersebut diperoleh dari retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp3.163.204.000,00 dari target sejumlah Rp1.377.776.000,00 sedangkan retribusi jasa usaha hanya terealisasi Rp11.014.063.877,00 dari target

Rp12.278.454.323,00 atau setara dengan 89,70 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel dibawah ini**

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Hasil Retribusi Daerah	18.828.028.323,00	19.336.663.877,00	508.635.554,00	102,70
Retribusi Jasa Umum	4.618.798.000,00	4.700.326.000,00	81.528.000,00	101,77
Retribusi Pelayanan Kesehatan	750.000.000,00	962.883.000,00	212.883.000,00	128,38
Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.255.798.000,00	3.117.974.000,00	(137.824.000,00)	95,77
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan	613.000.000,00	619.469.000,00	6.469.000,00	101,06
Retribusi Jasa Usaha	12.278.454.323,00	11.014.063.877,00	(1.264.390.446,00)	89,70
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -	1.749.031.000,00	1.321.368.797,00	(427.662.203,00)	75,55
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -	2.838.273.960,00	2.412.875.000,00	(425.398.960,00)	85,01
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	327.521.224,00	290.340.150,00	(37.181.074,00)	88,65
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	2.706.460.139,00	2.613.198.000,00	(93.262.139,00)	96,55
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.657.168.000,00	4.376.281.930,00	(280.886.070,00)	93,97
Retribusi Perizinan Tertentu	25.000.000,00	38.905.000,00	13.905.000,00	155,62
Retribusi Pemberian Izin Trayek	25.000.000,00	38.905.000,00	13.905.000,00	155,62
Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.377.776.000,00	3.163.204.000,00	1.785.428.000,00	229,59
Sewa Gedung Sport Hall Indoor (Kesos & PM)	26.000.000,00	23.350.000,00	(2.650.000,00)	89,81
Sewa Aula Bandiklatda (Bandiklatda)	72.000.000,00	102.400.000,00	30.400.000,00	142,22
Taman Hutan Kenali (Dinas Kehutanan)	60.000.000,00	86.597.500,00	26.597.500,00	144,33
Laboratorium (Bapedalda)	1.074.296.000,00	2.614.051.500,00	1.539.755.500,00	243,33
Sewa Tempat di TMII	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	88,89
Sewa Kamar Asrama 1 dan 2 (Bandiklatda)	26.880.000,00	240.905.000,00	214.025.000,00	896,22
Sewa Ruang Belajar (Bandiklatda)	64.800.000,00	48.300.000,00	(16.500.000,00)	74,54
Lapangan Tennis (Dinas Pendidikan)	8.800.000,00	7.600.000,00	(1.200.000,00)	86,36
Retribusi Perpanjangan Izin Memprkerjakan	528.000.000,00	420.165.000,00	(107.835.000,00)	79,58
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada	528.000.000,00	420.165.000,00	(107.835.000,00)	79,58

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan pada tahun 2015 telah terealisasi sejumlah Rp34.943.073.702,75 atau setara dengan 105,24 persen, pelampauan target tersebut diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta dengan realisasi Rp3.726.829.205,00 atau setara dengan 136,02 persen dari target sejumlah Rp2.739.829.205,00, begitu juga dengan pelampauan dari target Bagian Laba Penyertaan pada BPD Jambi telah terealisasi sejumlah Rp30.784.198.844,75 atau setara dengan 101,89 persen dari target Rp30.213.228.811,00,

sedangkan realisasi atas bagian Laba Penyertaan pada PT. JSP hanya mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel** dibawah ini

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.203.058.016,00	34.943.073.702,75	1.740.015.686,75	105,24
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.739.829.205,00	3.726.829.205,00	987.000.000,00	136,02
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Jambi Bisnis Center (PT.PUTRAKURNIA PROPERTI)	0,00	987.000.000,00	987.000.000,00	0,00
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Angso Duo (PT.ERAGUNABUMI NUSA)	2.211.700.000,00	2.211.700.000,00	0,00	100,00
- PT. Bangun Askrida	528.129.205,00	528.129.205,00	0,00	100,00
Bagian Laba Penyertaan pada BPD Jambi	30.213.228.811,00	30.784.198.844,75	570.970.033,75	101,89
Bagian Laba Penyertaan pada PT JSP	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)	90,00
Bagian Laba Penyertaan pada PT. Simota	0,00	207.045.653,00	207.045.653,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah terealisasi Rp177.651.591.804,15 atau setara dengan 118 persen dari target sejumlah Rp149.721.399.042,67. Pelampauan tersebut diperoleh dari hampir seluruh komponen pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kecuali pada komponen Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan hanya terealisasi Rp961.310.338,50 atau setara dengan 19,23 persen dari target Rp5.000.000.000,00 dan pendapatan BLUD yang hanya terealisasi Rp81.990.361.244,97 atau setara dengan 77,80 persen dari target Rp105.385.499.042,67, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel** dibawah ini

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	149.721.399.042,67	177.651.591.804,15	27.930.192.761,48	118,65
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.000.000.000,00	961.310.338,50	(4.038.689.661,50)	19,23
Pelepasan Hak Atas Tanah	5.000.000.000,00	959.735.338,50	(4.040.264.661,50)	19,19
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	2.555.000.000,00	5.990.839.755,19	3.435.839.755,19	234,48
Jasa Giro Kas Daerah	2.500.000.000,00	5.512.635.336,84	3.012.635.336,84	220,51
Jasa Giro Pemegang Kas	55.000.000,00	478.204.418,35	423.204.418,35	869,46
Penerimaan Bunga Deposito	35.000.000.000,00	45.076.643.464,04	10.076.643.464,04	128,79
Rekening Deposito Bank	35.000.000.000,00	45.076.643.464,04	10.076.643.464,04	128,79
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	1.155.908.940,68	1.155.908.940,68	0,00
Kerugian Uang	0,00	1.149.483.940,68	1.149.483.940,68	0,00
Kerugian Barang	0,00	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	27.736.101.044,00	27.736.101.044,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	27.258.594.644,00	27.258.594.644,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan	0,00	476.728.900,00	476.728.900,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	777.500,00	777.500,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.110.700,00	2.110.700,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan	0,00	2.110.700,00	2.110.700,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	(20.781.600,00)	(20.781.600,00)	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	0,00	(20.781.600,00)	(20.781.600,00)	0,00
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan	1.680.900.000,00	1.781.953.301,10	101.053.301,10	106,01
Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	1.680.900.000,00	1.781.953.301,10	101.053.301,10	106,01
Penerimaan Lain-Lain	100.000.000,00	11.986.083.265,67	11.886.083.265,67	11.986,08
Temuan Hasil Pemeriksaan	0,00	7.374.436.566,43	7.374.436.566,43	0,00
Pengembalian Gaji/Tunjangan/Taspen	100.000.000,00	81.605.028,00	(18.394.972,00)	81,61
Pengembalian Setoran Pihak Ketiga	0,00	4.511.168.671,24	4.511.168.671,24	0,00
Setoran Dealer dan Kendaraan Luar Daerah	0,00	18.873.000,00	18.873.000,00	0,00
Pendapatan BLUD	105.385.499.042,67	81.990.361.244,97	(23.395.137.797,70)	77,80
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum	90.000.000.000,00	62.075.726.092,06	(27.924.273.907,94)	68,97
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa	12.000.000.000,00	16.964.319.915,00	4.964.319.915,00	141,37
Pendapatan BLUD UPTD Akademik Analis Kesehatan	3.385.499.042,67	2.950.315.237,91	(435.183.804,76)	87,15
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	991.061.350,00	991.061.350,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	61.350,00	61.350,00	0,00
Pendapatan Atas Kompensasi Kelebihan Muatan	0,00	991.000.000,00	991.000.000,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

3.1.2.2 Dana Perimbangan

Selama tahun 2015 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp1.419.079.798.364,00 atau mencapai 92,90 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.527.551.544.653,32, realisasi dana perimbangan tersebut juga lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp1.514.518.389.005,00 atau

mengalami penurunan sebesar 6,30 persen. Dari empat sumber pendapatan dana perimbangan tersebut, pendapatan yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 76,44 persen atau sejumlah Rp351.969.164.364,00 dari target sebesar Rp460.440.910.653,32, sehingga masih terdapat penerimaan kurang salur dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp108.471.746.289,32. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perkembangan Dana Perimbangan Periode 2013-2014

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
DANA PERIMBANGAN	1.527.551.544.653,32	1.419.079.798.364,00	(108.471.746.289,32)	92,90
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	460.440.910.653,32	351.969.164.364,00	(108.471.746.289,32)	76,44
Bagi Hasil Pajak	247.993.647.000,00	179.892.405.250,00	(68.101.241.750,00)	72,54
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor	191.326.777.000,00	137.393.619.250,00	(53.933.157.750,00)	71,81
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	0,00	856.317.600,00	856.317.600,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor	0,00	6.232.879.000,00	6.232.879.000,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor WPODN dan PPH 21	56.666.870.000,00	33.143.804.400,00	(23.523.065.600,00)	58,49
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	212.447.263.653,32	172.076.759.114,00	(40.370.504.539,32)	81,00
Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	62.620.064,00	28.300.064,00	(34.320.000,00)	45,19
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.475.181.310,00	2.178.258.660,00	(2.296.922.650,00)	48,67
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.256.998.479,00	5.860.602.979,00	(2.396.395.500,00)	70,98
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi	34.656.783.225,00	24.892.786.125,00	(9.763.997.100,00)	71,83
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	65.757.375.124,00	53.878.443.124,00	(11.878.932.000,00)	81,94
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	87.921.594.762,00	75.649.909.662,00	(12.271.685.100,00)	86,04
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau BP-PBB.	1.627.610.689,32	2.171.083.000,00	543.472.310,68	133,39
BP-PBB.	9.689.100.000,00	7.417.375.500,00	(2.271.724.500,00)	76,55
Dana Alokasi Umum	1.009.165.864.000,00	1.009.165.864.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Umum	1.009.165.864.000,00	1.009.165.864.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	57.944.770.000,00	57.944.770.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	57.944.770.000,00	57.944.770.000,00	0,00	100,00
DAK Bidang Kesehatan	4.072.780.000,00	5.435.542.210,48	1.362.762.210,48	133,46
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	27.808.950.000,00	24.813.391.536,83	(2.995.558.463,17)	89,23
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	11.555.610.000,00	13.634.072.013,24	2.078.462.013,24	117,99
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	3.443.090.000,00	4.222.037.385,46	778.947.385,46	122,62
DAK Bidang Pertanian	8.924.890.000,00	7.866.292.255,82	(1.058.597.744,18)	88,14
DAK Bidang Kehutanan	961.210.000,00	828.962.842,40	(132.247.157,60)	86,24
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	1.178.240.000,00	1.144.471.755,77	(33.768.244,23)	97,13

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dana alokasi umum memberikan porsi tertinggi dari penerimaan dana perimbangan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 71,11 persen, dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 24,80 persen dan dana alokasi khusus sebesar 4,08 persen.

3.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2015 penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp474.622.781.216,00 atau 99,22 persen dari target yang telah ditetapkan, tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena masih terdapatnya kurang salur dari komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang merupakan dana transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi terealisasi Rp1.812.783.000,00 atau 65,85 persen dan Dana Bantuan Operasional Sekolah terealisasi Rp442.029.037.500,00 atau terealisasi 98,22 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	478.332.166.000,00	474.622.781.216,00	(3.709.384.784,00)	99,22
Pendapatan Hibah	1.430.247.000,00	6.651.030.716,00	5.220.783.716,00	465,03
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	90.807.000,00	5.311.590.716,00	5.220.783.716,00	5.849,32
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	90.807.000,00	5.311.590.716,00	5.220.783.716,00	5.849,32
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi	1.339.440.000,00	1.339.440.000,00	0,00	100,00
Sumbangan Jasa Raharja	1.339.440.000,00	1.339.440.000,00	0,00	100,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	476.901.919.000,00	467.971.750.500,00	(8.930.168.500,00)	98,13
Dana Penyesuaian	476.901.919.000,00	467.971.750.500,00	(8.930.168.500,00)	98,13
Dana Insentif Daerah	24.129.930.000,00	24.129.930.000,00	0,00	100,00
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	2.752.989.000,00	1.812.783.000,00	(940.206.000,00)	65,85
Bantuan Operasional Sekolah	450.019.000.000,00	442.029.037.500,00	(7.989.962.500,00)	98,22

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sejumlah Rp105.324.850.497,00 atau meningkat 28,52 persen, peningkatan terbesar terjadi pada komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa peningkatan dana BOS sejumlah Rp93.772.686.500 atau meningkat 26,93 persen dari Rp348.256.351.000,00 pada tahun 2014 menjadi Rp442.029.037.500 pada tahun 2015.

Target pendapatan daerah pada tahun 2015 dilaksanakan oleh 22 SKPD Pemungut dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi berdasarkan SKPD Pemungut Tahun 2015

No	SKPD	TARGET	REALISASI *)	+/-	(%)
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	268.800.000,00	252.045.000,00	(16.755.000,00)	93,77
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	5.816.399.042,67	5.695.151.539,01	(121.247.503,66)	97,92
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	90.000.000.000,00	63.084.692.342,06	(26.915.307.657,94)	70,09
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	12.000.000.000,00	16.964.319.915,00	4.964.319.915,00	141,37
5	Dinas Pekerjaan Umum	200.000.000,00	240.330.797,00	40.330.797,00	120,17
6	Dinas Perhubungan	25.000.000,00	1.029.905.000,00	1.004.905.000,00	4.119,62
7	Badan Lingkungan Hidup	1.074.296.000,00	2.614.051.500,00	1.539.755.500,00	243,33
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	554.000.000,00	443.515.000,00	(110.485.000,00)	80,06
9	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	14.000.000,00	3.775.717.100,00	3.761.717.100,00	26.969,41
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	359.000.000,00	256.346.850,00	(102.653.150,00)	71,41
11	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	2.706.460.139,00	2.613.198.000,00	(93.262.139,00)	96,55
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.082.917.799.669,32	2.017.141.522.294,83	(65.776.277.374,49)	96,84
13	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	2.883.273.960,00	2.452.875.000,00	(430.398.960,00)	85,07
14	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	1.051.871.850.000,00	1.010.297.495.649,00	(41.574.354.351,00)	96,05
15	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.159.478.000,00	3.265.134.000,00	105.656.000,00	103,34
16	KPID	0,00	264.700.366,00	264.700.366,00	
17	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	428.000.000,00	467.674.000,00	39.674.000,00	109,27
18	Dinas Perkebunan	1.314.000.000,00	1.402.103.430,00	88.103.430,00	106,70
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.895.168.000,00	2.496.504.500,00	(398.663.500,00)	86,23
20	Dinas Kehutanan	80.000.000,00	285.797.500,00	205.797.500,00	357,25
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	327.521.224,00	290.340.150,00	(37.181.074,00)	88,65
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	613.000.000,00	619.469.000,00	6.469.000,00	101,06
Jumlah		3.259.508.046.034,99	3.135.952.888.932,90	(123.555.157.102,09)	96,21

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok utang. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2015 diperoleh dari SiLPA tahun lalu sejumlah Rp474.526.424.640,93 terdiri dari pelampauan target penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp48.547.553.665,72 atau 128,01 persen dari target sejumlah Rp37.924.005.948,77 dan sisa atas penghematan belanja akibat lainnya

sejumlah Rp425.978.870.975,21, Pada tahun 2015 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan daerah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Perkembangan Pembiayaan Periode 2014-2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
	TARGET	REALISASI *)	(Rp)
1	2	3	4
SURPLUS / (DEFISIT)	(474.526.424.640,93)	(290.451.273.300,07)	184.075.151.340,86
PEMBIAYAAN DAERAH	474.526.424.640,93	474.526.424.640,93	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	474.526.424.640,93	474.526.424.640,93	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	474.526.424.640,93	474.526.424.640,93	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan	37.924.005.948,77	48.547.553.665,72	10.623.547.716,95
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37.924.005.948,77	48.547.553.665,72	10.623.547.716,95
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	436.602.418.692,16	425.978.870.975,21	(10.623.547.716,95)
Belanja Pegawai	87.435.289.896,54	76.811.742.179,59	(10.623.547.716,95)
Belanja Barang dan Jasa	133.214.703.358,66	133.214.703.358,66	0,00
Belanja Modal	160.531.281.973,91	160.531.281.973,91	0,00
Belanja Hibah	32.917.867.241,00	32.917.867.241,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	5.983.250.000,00	5.983.250.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	16.520.026.222,05	16.520.026.222,05	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	474.526.424.640,93	474.526.424.640,93	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	184.075.151.340,86	184.075.151.340,86

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa untuk kurun waktu Tahun 2015 terdapat defisit pada APBD Provinsi Jambi sebesar Rp290.451.273.300,07 yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan Rp3.135.952.888.932,90 dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3.426.404.162.232,97. Jumlah defisit tersebut ditutupi oleh pembiayaan netto. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan, untuk tahun 2015 pembiayaan netto tercatat Rp474.526.424.640,93. Selanjutnya untuk tahun 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sejumlah Rp184.075.151.340,86 (angka sementara), SiLPA tersebut merupakan selisih atas penjumlahan surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2 Alokasi dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Pada tahun 2015 untuk anggaran belanja dialokasikan sejumlah ~~Rp3Rp3~~ Rp3.734.034.470.675,92 dengan rincian alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah ~~Rp4Rp1~~ Rp1.908.695.340.699,83 atau setara dengan 51,12 persen ~~dari total target belanja~~, sedangkan untuk Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar ~~Rp4Rp1~~ Rp1.825.339.129.976,09 atau setara dengan 48,88 ~~29persenpersen~~ dari total anggaran belanja daerah. Dari alokasi belanja daerah tersebut telah direalisasikan sebesar ~~Rp3Rp3~~ Rp3.426.404.162.232,97 atau setara dengan 91,76 persen, terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp1.762.750.171.091,00 setara dengan 92,35 ~~14~~ persen dari target anggaran dan untuk Belanja Langsung terealisasi ~~Rp1~~ Rp1.663.653.991.141,97 atau setara dengan 91,14 persen dari target anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
	ANGGARAN	REALISASI*		
1	2	3	4	5
BELANJA	3.734.034.470.675,92	3.426.404.162.232,97	(307.630.308.442,95)	91,76
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.908.695.340.699,83	1.762.750.171.091,00	(145.945.169.608,83)	92,35
Belanja Pegawai	578.868.101.703,83	552.600.524.746,00	(26.267.576.957,83)	95,46
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	630.847.806.000,00	622.073.947.596,00	(8.773.858.404,00)	98,61
Belanja Bantuan Sosial	617.250.000,00	0,00	(617.250.000,00)	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	560.861.937.749,00	467.708.759.824,00	(93.153.177.925,00)	83,39
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	134.000.245.247,00	119.320.828.925,00	(14.679.416.322,00)	89,05
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.046.110.000,00	(2.453.890.000,00)	29,89
BELANJA LANGSUNG	1.825.339.129.976,09	1.663.653.991.141,97	(161.685.138.834,12)	91,14
Belanja Pegawai	135.534.769.782,31	110.902.567.956,00	(24.632.201.826,31)	81,83
Belanja Barang dan Jasa	859.778.165.581,78	759.990.416.195,08	(99.787.749.386,70)	88,39
Belanja Modal	830.026.194.612,00	792.761.006.990,89	(37.265.187.621,11)	95,51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 dapat dibedakan menjadi 2 urusan yaitu Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, untuk urusan wajib dialokasikan sebesar **Rp1.681.287.801.976,09** atau 92,11 persen sedangkan urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp144.051.328.000,00 atau 7,89 persen dari jumlah belanja langsung. Penyerapan anggaran urusan wajib terealisasi sebesar 91,12 persen atau sejumlah **Rp1.531.906.813.314,92**. Sedangkan untuk urusan pilihan terealisasi **Rp131.747.177.827,05** atau 91,46 persen dari anggaran yang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 menurut urusan

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
1	Urusan Wajib	1.681.287.801.976,09	1.531.906.813.314,92	149.380.988.661,17	91,12
	Belanja Pegawai	126.958.806.382,31	102.585.320.056,00	24.373.486.326,31	
	Belanja Barang dan Jasa	754.216.061.949,78	665.324.008.682,08	88.892.053.267,70	
	Belanja Modal	800.112.933.644,00	763.997.484.576,84	36.115.449.067,16	
2	Urusan Pilihan	144.051.328.000,00	131.747.177.827,05	12.304.150.172,95	91,46
	Belanja Pegawai	8.575.963.400,00	8.317.247.900,00	258.715.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	105.562.103.632,00	94.666.407.513,00	10.895.696.119,00	
	Belanja Modal	29.913.260.968,00	28.763.522.414,05	1.149.738.553,95	
	Jumlah Belanja	1.825.339.129.976,09	1.663.653.991.141,97	161.685.138.834,12	91,14

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk belanja tidak langsung, realisasi terbesar adalah belanja hibah sejumlah Rp622.073.947.596,00 yang terdiri dari hibah kepada badan/lembaga/organisasi sejumlah Rp175.355.550.096,00 dan Hibah Dana BOS sejumlah Rp446.718.397.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi atas hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - a. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Pemerintah Provinsi Jambi telah merealisasikan anggaran sejumlah Rp153.063.806.000,00 yang didistribusikan kepada:
 - 1) Hibah kepada KPU sejumlah Rp101.000.000.000,00;
 - 2) Hibah kepada Bawaslu Provinsi Jambi sejumlah Rp30.500.000.000,00;
 - 3) Hibah kepada POLDA Jambi sejumlah Rp20.000.000.000,00;
 - 4) Hibah kepada TNI sejumlah Rp1.563.806.000,00.
 - b. Hibah kepada KONI sejumlah Rp17.601.319.851,00
 - c. Hibah kepada Lembaga dan Organisasi lainnya seperti PMI, MUI, NPC, Baznas, PPTI, Rumah Ibadah, LAM, Lembaga Adat Kota Sungai Penuh, IPHI sejumlah Rp4.690.424.245,00
 - d. Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan hibah yang bersifat wajib dan mengikat dan didistribusikan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan realisasi sejumlah Rp446.718.397.500,00 atau setara dengan 99,27 persen dari target Rp450.019.000.000,00. Selanjutnya untuk lebih jelasnya realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.12
 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tahun
 2015

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI *)	SISA ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	578.868.101.703,83	552.600.524.746,00	(26.267.576.957,83)	95,46
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	382.995.966.416,00	375.776.708.475,00	(7.219.257.941,00)	98,12
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	149.127.767.712,83	138.594.534.200,00	(10.533.233.512,83)	92,94
1.3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.819.500.000,00	7.711.500.000,00	(108.000.000,00)	98,62
1.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	8.332.192.075,00	0,00	(8.332.192.075,00)	0,00
1.5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	30.592.675.500,00	30.517.782.071,00	(74.893.429,00)	99,76
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	630.847.806.000,00	622.073.947.596,00	(8.773.858.404,00)	98,61
3.1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	180.828.806.000,00	175.355.550.096,00	(5.473.255.904,00)	96,97
3.2	Belanja Hibah Dana BOS	450.019.000.000,00	446.718.397.500,00	(3.300.602.500,00)	99,27
4	Belanja Bantuan Sosial	617.250.000,00	0,00	(617.250.000,00)	0,00
4.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	617.250.000,00	0,00	(617.250.000,00)	0,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	560.861.937.749,00	467.708.759.824,00	(93.153.177.925,00)	83,39
5.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	560.861.937.749,00	467.708.759.824,00	(93.153.177.925,00)	83,39
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	134.000.245.247,00	119.320.828.925,00	(14.679.416.322,00)	89,05
6.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	132.500.000.000,00	118.100.000.000,00	(14.400.000.000,00)	89,13
6.2	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.500.245.247,00	1.220.828.925,00	(279.416.322,00)	81,38
7	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.046.110.000,00	(2.453.890.000,00)	29,89
6.1	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	1.046.110.000,00	(2.453.890.000,00)	29,89
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.908.695.340.699,83	1.762.750.171.091,00	(145.945.169.608,83)	92,35

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Belanja Tidak Langsung menurut SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut SKPD Provinsi
Jambi Tahun 2015

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	31.478.947.130,00	25.444.708.283,00	6.034.238.847,00	80,83
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	29.351.612.460,00	29.173.568.376,00	178.044.084,00	99,39
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	72.096.950.439,00	71.582.458.293,00	514.492.146,00	99,29
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	20.097.508.125,00	19.911.138.960,00	186.369.165,00	99,07
5	Dinas Pekerjaan Umum	25.547.303.615,00	25.335.804.764,00	211.498.851,00	99,17
6	BAPPEDA	8.819.494.735,00	8.695.552.628,00	123.942.107,00	98,59
7	Dinas Perhubungan	13.368.705.126,00	13.275.738.078,00	92.967.048,00	99,30
8	Badan Lingkungan Hidup	6.875.962.133,00	6.721.017.668,00	154.944.465,00	97,75
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan	6.412.621.592,00	6.300.863.724,00	111.757.868,00	98,26
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.791.388.032,00	3.704.109.321,00	87.278.711,00	97,70
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.166.219.863,00	22.970.007.054,00	196.212.809,00	99,15
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6.728.410.835,00	6.472.492.224,00	255.918.611,00	96,20
13	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.009.520.291,00	4.700.416.089,00	309.104.202,00	93,83
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.473.794.940,00	12.288.408.661,00	185.386.279,00	98,51
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	7.991.141.149,00	7.807.876.046,00	183.265.103,00	97,71
16	Satuan Polisi Pamong Praja	12.855.594.345,00	12.469.401.149,00	386.193.196,00	97,00
17	Badan Kesbangpol	4.516.729.551,00	4.424.591.533,00	92.138.018,00	97,96
18	DPRD Provinsi Jambi	16.260.778.260,00	15.270.559.524,00	990.218.736,00	93,91
19	Kepala Daerah	2.224.137.854,00	2.037.326.988,00	186.810.866,00	91,60
20	Sekretariat Daerah	46.238.506.397,00	45.777.996.397,00	460.510.000,00	99,00
21	Sekretariat Dewan	6.758.154.185,00	6.533.850.433,00	224.303.752,00	96,68
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.348.097.038.846,83	1.225.206.398.187,00	122.890.640.659,83	90,88
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.447.190.900,00	5.129.616.715,00	317.574.185,00	94,17
24	Inspektorat Provinsi	8.426.808.300,00	8.303.778.286,00	123.030.014,00	98,54
25	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	4.993.754.994,00	4.835.764.499,00	157.990.495,00	96,84
26	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	51.003.315.875,00	42.443.511.152,00	8.559.804.723,00	83,22
27	Sekretariat KORPRI	2.643.687.349,00	2.440.161.544,00	203.525.805,00	92,30
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	7.122.651.393,00	6.930.084.124,00	192.567.269,00	97,30
29	Badan Kepegawaian Daerah	9.430.211.579,00	9.154.621.795,00	275.589.784,00	97,08
30	KPID	2.214.284.288,00	2.078.354.300,00	135.929.988,00	93,86
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.304.232.058,00	3.142.273.932,00	161.958.126,00	95,10
32	Badan Perpustakaan dan Arsip	9.008.783.783,00	8.818.987.132,00	189.796.651,00	97,89
33	Badan Ketahanan Pangan	6.531.779.812,00	6.384.063.618,00	147.716.194,00	97,74
34	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	6.070.699.510,00	5.868.398.480,00	202.301.030,00	96,67
35	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	22.058.199.020,00	21.897.089.575,00	161.109.445,00	99,27
36	Dinas Perkebunan	10.757.952.321,00	10.633.641.618,00	124.310.703,00	98,84
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.766.917.879,00	8.529.257.461,00	237.660.418,00	97,29
38	Dinas Kehutanan	11.865.173.615,00	11.680.804.003,00	184.369.612,00	98,45
39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.952.894.232,00	4.823.721.117,00	129.173.115,00	97,39
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.009.929.048,00	11.814.852.386,00	195.076.662,00	98,38
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.926.354.840,00	11.736.904.974,00	189.449.866,00	98,41
Jumlah		1.908.695.340.699,83	1.762.750.171.091,00	145.945.169.608,83	92,35

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Sedangkan untuk belanja langsung pada tahun 2015, realisasi terbesar adalah belanja modal sejumlah Rp792.761.006.990,89 atau setara dengan 95,51 persen dari alokasi anggaran, diikuti oleh belanja barang dan jasa

teralisasi Rp759.990.416.195,08 atau 88,39 persen dari alokasi dan relisasi belanja pegawai sejumlah Rp110.902.567.956.00 atau setara dengan 81,83 persen dari alokasi anggaran, untuk lebih jelaskan belanja langsung pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung menurut SKPD Tahun 2015

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	247.386.566.435,00	229.218.719.383,00	18.167.847.052,00	92,66
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	25.819.022.536,00	22.954.287.677,33	2.864.734.858,67	88,90
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	218.308.236.912,37	165.534.119.881,00	52.774.117.031,37	75,83
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	37.888.765.217,72	35.133.962.998,07	2.754.802.219,65	92,73
5	Dinas Pekerjaan Umum	760.500.339.475,00	722.183.188.963,00	38.317.150.512,00	94,96
6	BAPPEDA	16.535.000.000,00	15.631.905.402,50	903.094.597,50	94,54
7	Dinas Perhubungan	33.506.207.500,00	30.865.808.669,21	2.640.398.830,79	92,12
8	Badan Lingkungan Hidup	7.704.026.000,00	6.905.334.934,00	798.691.066,00	89,63
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan	8.450.176.400,00	7.870.471.461,00	579.704.939,00	93,14
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.477.595.000,00	2.804.167.752,00	673.427.248,00	80,64
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.616.975.000,00	17.088.265.126,00	1.528.709.874,00	91,79
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9.744.553.000,00	8.847.282.030,00	897.270.970,00	90,79
13	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.236.275.000,00	4.018.657.845,00	217.617.155,00	94,86
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.074.754.000,00	16.589.109.631,00	1.485.644.369,00	91,78
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	22.156.614.000,00	20.222.024.379,23	1.934.589.620,77	91,27
16	Satuan Polisi Pamong Praja	7.654.932.000,00	7.167.399.087,00	487.532.913,00	93,63
17	Badan Kesbangpol	6.800.371.000,00	6.481.397.568,00	318.973.432,00	95,31
18	Sekretariat Daerah	85.268.299.000,00	79.767.564.510,00	5.500.734.490,00	93,55
19	Sekretariat Dewan	42.621.825.500,00	33.518.345.129,58	9.103.480.370,42	78,64
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18.748.231.000,00	17.673.306.841,00	1.074.924.159,00	94,27
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.147.458.000,00	3.921.802.551,00	225.655.449,00	94,56
22	Inspektorat Provinsi	10.305.318.000,00	9.514.645.398,00	790.672.602,00	92,33
23	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	9.853.000.000,00	9.558.427.798,00	294.572.202,00	97,01
24	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	18.548.795.000,00	16.419.935.135,00	2.128.859.865,00	88,52
25	Sekretariat KORPRI	3.045.373.000,00	2.857.603.733,00	187.769.267,00	93,83
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12.146.360.000,00	11.065.053.177,00	1.081.306.823,00	91,10
27	Badan Kepegawaian Daerah	4.907.567.000,00	4.281.692.858,00	625.874.142,00	87,25
28	KPID	2.932.734.000,00	2.710.532.526,00	222.201.474,00	92,42
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.629.000.000,00	9.140.152.940,00	488.847.060,00	94,92
30	Badan Perpustakaan dan Arsip	7.131.252.000,00	6.857.422.186,00	273.829.814,00	96,16
31	Badan Ketahanan Pangan	4.581.279.000,00	4.372.551.399,00	208.727.601,00	95,44
32	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	5.095.473.000,00	4.730.189.181,00	365.283.819,00	92,83
33	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	23.038.510.500,00	21.840.682.454,00	1.197.828.046,00	94,80
34	Dinas Perkebunan	33.125.893.000,00	29.798.606.084,00	3.327.286.916,00	89,96
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.865.933.000,00	22.437.119.862,99	1.428.813.137,01	94,01
36	Dinas Kehutanan	9.732.846.000,00	8.509.172.383,00	1.223.673.617,00	87,43
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.005.133.000,00	9.144.763.790,00	2.860.369.210,00	76,17
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.110.676.500,00	26.061.698.504,06	1.048.977.995,94	96,13
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.637.764.000,00	9.956.619.914,00	681.144.086,00	93,60
Jumlah		1.825.339.129.976,09	1.663.653.991.141,97	161.685.138.834,12	91,14

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat 10 SKPD yang tingkat realisasinya berada di bawah 90,00 persen yaitu RSUD Raden Mattaher dengan realisasi 75,83 persen, Dinas ESDM dengan realisasi 76,17 persen, Sekretariat Dewan dengan realisasi 78,64 persen, Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi 87,25 persen, Dinas Kehutanan dengan realisasi 87,43 persen, Dinas Pendapatan dengan realisasi 88,52 persen, Dinas Kesehatan dengan realisasi 88,90 persen, Badan Lingkungan Hidup dengan realisasi 89,63 persen dan Dinas Perkebunan dengan realisasi 89,96 persen. Realisasi Belanja Langsung menurut Jenis Jenis Belanja per SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.15

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung menurut Jenis Belanja per SKPD
Tahun 2015

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	247.386.566.435,00	229.218.719.383,00	18.167.847.052,00	92,66
	Belanja Pegawai	11.126.981.500,00	10.647.606.000,00	479.375.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	173.402.480.835,00	157.207.388.063,00	16.195.092.772,00	
	Belanja Modal	62.857.104.100,00	61.363.725.320,00	1.493.378.780,00	
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	25.819.022.536,00	22.954.287.677,33	2.864.734.858,67	88,90
	Belanja Pegawai	3.155.839.731,31	3.017.848.110,00	137.991.621,31	
	Belanja Barang dan Jasa	19.396.249.289,69	18.030.029.753,00	1.366.219.536,69	
	Belanja Modal	3.266.933.515,00	1.906.409.814,33	1.360.523.700,67	
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	218.308.236.912,37	165.534.119.881,00	52.774.117.031,37	75,83
	Belanja Pegawai	70.187.283.651,00	49.051.468.446,00	21.135.815.205,00	
	Belanja Barang dan Jasa	87.040.109.012,37	60.498.788.530,00	26.541.320.482,37	
	Belanja Modal	61.080.844.249,00	55.983.862.905,00	5.096.981.344,00	
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	37.888.765.217,72	35.133.962.998,07	2.754.802.219,65	92,73
	Belanja Pegawai	2.191.244.400,00	2.055.926.100,00	135.318.300,00	
	Belanja Barang dan Jasa	21.979.740.809,72	19.936.470.392,00	2.043.270.417,72	
	Belanja Modal	13.717.780.008,00	13.141.566.506,07	576.213.501,93	
5	Dinas Pekerjaan Umum	760.500.339.475,00	722.183.188.963,00	38.317.150.512,00	94,96
	Belanja Pegawai	4.942.503.000,00	4.565.313.000,00	377.190.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	147.068.369.489,00	135.589.013.055,00	11.479.356.434,00	
	Belanja Modal	608.489.466.986,00	582.028.862.908,00	26.460.604.078,00	
6	BAPPEDA	16.535.000.000,00	15.631.905.402,50	903.094.597,50	94,54
	Belanja Pegawai	1.539.327.000,00	1.465.147.500,00	74.179.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	14.614.811.000,00	13.787.134.902,50	827.676.097,50	
	Belanja Modal	380.862.000,00	379.623.000,00	1.239.000,00	
7	Dinas Perhubungan	33.506.207.500,00	30.865.808.669,21	2.640.398.830,79	92,12
	Belanja Pegawai	1.558.365.000,00	1.222.154.500,00	336.210.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	13.695.641.750,00	11.794.691.050,00	1.900.950.700,00	
	Belanja Modal	18.252.200.750,00	17.848.963.119,21	403.237.630,79	
8	Badan Lingkungan Hidup	7.704.026.000,00	6.905.334.934,00	798.691.066,00	89,63
	Belanja Pegawai	389.335.000,00	356.789.500,00	32.545.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.337.844.868,00	5.643.979.834,00	693.865.034,00	
	Belanja Modal	976.846.132,00	904.565.600,00	72.280.532,00	
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan	8.450.176.400,00	7.870.471.461,00	579.704.939,00	93,14
	Belanja Pegawai	457.840.000,00	442.146.000,00	15.694.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.946.304.200,00	7.382.545.461,00	563.758.739,00	
	Belanja Modal	46.032.200,00	45.780.000,00	252.200,00	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.477.595.000,00	2.804.167.752,00	673.427.248,00	80,64
	Belanja Pegawai	579.939.000,00	481.194.000,00	98.745.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.732.656.000,00	2.159.173.752,00	573.482.248,00	
	Belanja Modal	165.000.000,00	163.800.000,00	1.200.000,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.616.975.000,00	17.088.265.126,00	1.528.709.874,00	91,79
	Belanja Pegawai	1.574.063.900,00	1.550.121.900,00	23.942.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	16.314.471.100,00	14.840.314.226,00	1.474.156.874,00	
	Belanja Modal	728.440.000,00	697.829.000,00	30.611.000,00	
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan	9.744.553.000,00	8.847.282.030,00	897.270.970,00	90,79
	Belanja Pegawai	335.618.000,00	324.818.000,00	10.800.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.458.684.300,00	6.727.315.030,00	731.369.270,00	
	Belanja Modal	1.950.250.700,00	1.795.149.000,00	155.101.700,00	
13	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.236.275.000,00	4.018.657.845,00	217.617.155,00	94,86
	Belanja Pegawai	600.232.000,00	536.849.500,00	63.382.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	3.582.018.000,00	3.427.838.345,00	154.179.655,00	
	Belanja Modal	54.025.000,00	53.970.000,00	55.000,00	
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.074.754.000,00	16.589.109.631,00	1.485.644.369,00	91,78
	Belanja Pegawai	1.254.918.500,00	1.205.687.700,00	49.230.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	14.003.586.500,00	12.655.376.931,00	1.348.209.569,00	
	Belanja Modal	2.816.249.000,00	2.728.045.000,00	88.204.000,00	
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	22.156.614.000,00	20.222.024.379,23	1.934.589.620,77	91,27
	Belanja Pegawai	3.034.774.900,00	2.966.599.400,00	68.175.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	16.159.958.500,00	14.382.528.453,00	1.777.430.047,00	
	Belanja Modal	2.961.880.600,00	2.872.896.526,23	88.984.073,77	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	7.654.932.000,00	7.167.399.087,00	487.532.913,00	93,63
	Belanja Pegawai	2.089.894.400,00	2.025.749.400,00	64.145.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.044.510.675,00	4.631.609.137,00	412.901.538,00	
	Belanja Modal	520.526.925,00	510.040.550,00	10.486.375,00	
17	Badan Kesbangpol	6.800.371.000,00	6.481.397.568,00	318.973.432,00	95,31
	Belanja Pegawai	790.315.000,00	773.101.250,00	17.213.750,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.902.556.000,00	5.603.796.318,00	298.759.682,00	
	Belanja Modal	107.500.000,00	104.500.000,00	3.000.000,00	
18	Sekretariat Daerah	85.268.299.000,00	79.767.564.510,00	5.500.734.490,00	93,55
	Belanja Pegawai	8.433.078.500,00	7.883.904.900,00	549.173.600,00	
	Belanja Barang dan Jasa	73.659.413.500,00	68.789.052.610,00	4.870.360.890,00	
	Belanja Modal	3.175.807.000,00	3.094.607.000,00	81.200.000,00	
19	Sekretariat Dewan	42.621.825.500,00	33.518.345.129,58	9.103.480.370,42	78,64
	Belanja Pegawai	441.500.900,00	381.714.900,00	59.786.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	38.028.434.730,00	29.170.644.449,58	8.857.790.280,42	
	Belanja Modal	4.151.889.870,00	3.965.985.780,00	185.904.090,00	
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18.748.231.000,00	17.673.306.841,00	1.074.924.159,00	94,27
	Belanja Pegawai	2.598.455.380,00	2.493.646.500,00	104.808.880,00	
	Belanja Barang dan Jasa	10.350.175.731,00	9.481.229.314,00	868.946.417,00	
	Belanja Modal	5.799.599.889,00	5.698.431.027,00	101.168.862,00	
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.147.458.000,00	3.921.802.551,00	225.655.449,00	94,56
	Belanja Pegawai	809.858.000,00	786.390.500,00	23.467.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.922.435.000,00	2.730.159.551,00	192.275.449,00	
	Belanja Modal	415.165.000,00	405.252.500,00	9.912.500,00	
22	Inspektorat Provinsi	10.305.318.000,00	9.514.645.398,00	790.672.602,00	92,33
	Belanja Pegawai	439.862.400,00	382.875.400,00	56.987.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	9.378.405.600,00	8.679.836.098,00	698.569.502,00	
	Belanja Modal	487.050.000,00	451.933.900,00	35.116.100,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
23	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	9.853.000.000,00	9.558.427.798,00	294.572.202,00	97,01
	Belanja Pegawai	778.648.500,00	769.879.000,00	8.769.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.047.351.500,00	7.773.678.798,00	273.672.702,00	
	Belanja Modal	1.027.000.000,00	1.014.870.000,00	12.130.000,00	
24	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	18.548.795.000,00	16.419.935.135,00	2.128.859.865,00	88,52
	Belanja Pegawai	2.531.876.400,00	2.378.768.400,00	153.108.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	13.428.768.600,00	11.486.774.335,00	1.941.994.265,00	
	Belanja Modal	2.588.150.000,00	2.554.392.400,00	33.757.600,00	
25	Sekretariat KORPRI	3.045.373.000,00	2.857.603.733,00	187.769.267,00	93,83
	Belanja Pegawai	495.135.620,00	479.433.500,00	15.702.120,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.120.817.930,00	1.952.266.951,00	168.550.979,00	
	Belanja Modal	429.419.450,00	425.903.282,00	3.516.168,00	
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12.146.360.000,00	11.065.053.177,00	1.081.306.823,00	91,10
	Belanja Pegawai	472.868.700,00	398.841.400,00	74.027.300,00	
	Belanja Barang dan Jasa	10.314.962.300,00	9.317.280.469,00	997.681.831,00	
	Belanja Modal	1.358.529.000,00	1.348.931.308,00	9.597.692,00	
27	Badan Kepegawaian Daerah	4.907.567.000,00	4.281.692.858,00	625.874.142,00	87,25
	Belanja Pegawai	614.546.500,00	477.131.000,00	137.415.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.015.570.500,00	3.533.856.241,00	481.714.259,00	
	Belanja Modal	277.450.000,00	270.705.617,00	6.744.383,00	
28	KPID	2.932.734.000,00	2.710.532.526,00	222.201.474,00	92,42
	Belanja Pegawai	601.884.000,00	594.924.000,00	6.960.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.180.018.750,00	1.703.386.435,00	476.632.315,00	
	Belanja Modal	150.831.250,00	412.222.091,00	(261.390.841,00)	
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.629.000.000,00	9.140.152.940,00	488.847.060,00	94,92
	Belanja Pegawai	965.810.000,00	941.945.000,00	23.865.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.870.690.000,00	7.454.237.940,00	416.452.060,00	
	Belanja Modal	792.500.000,00	743.970.000,00	48.530.000,00	
30	Badan Perpustakaan dan Arsip	7.131.252.000,00	6.857.422.186,00	273.829.814,00	96,16
	Belanja Pegawai	614.510.500,00	612.766.750,00	1.743.750,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.581.876.000,00	5.316.247.436,00	265.628.564,00	
	Belanja Modal	934.865.500,00	928.408.000,00	6.457.500,00	
31	Badan Ketahanan Pangan	4.581.279.000,00	4.372.551.399,00	208.727.601,00	95,44
	Belanja Pegawai	500.063.000,00	494.728.000,00	5.335.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.044.441.480,00	3.841.500.976,00	202.940.504,00	
	Belanja Modal	36.774.520,00	36.322.423,00	452.097,00	
32	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	5.095.473.000,00	4.730.189.181,00	365.283.819,00	92,83
	Belanja Pegawai	924.248.000,00	882.490.500,00	41.757.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.055.265.000,00	3.731.738.681,00	323.526.319,00	
	Belanja Modal	115.960.000,00	115.960.000,00	0,00	
33	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	23.038.510.500,00	21.840.682.454,00	1.197.828.046,00	94,80
	Belanja Pegawai	1.583.976.400,00	1.574.681.400,00	9.295.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	14.474.162.401,00	13.600.680.054,00	873.482.347,00	
	Belanja Modal	6.980.371.699,00	6.665.321.000,00	315.050.699,00	
34	Dinas Perkebunan	33.125.893.000,00	29.798.606.084,00	3.327.286.916,00	89,96
	Belanja Pegawai	528.237.400,00	459.212.450,00	69.024.950,00	
	Belanja Barang dan Jasa	28.490.029.450,00	25.555.220.174,00	2.934.809.276,00	
	Belanja Modal	4.107.626.150,00	3.784.173.460,00	323.452.690,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.865.933.000,00	22.437.119.862,99	1.428.813.137,01	94,01
	Belanja Pegawai	1.990.883.000,00	1.932.422.500,00	58.460.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	12.792.122.000,00	11.692.266.214,00	1.099.855.786,00	
	Belanja Modal	9.082.928.000,00	8.812.431.148,99	270.496.851,01	
36	Dinas Kehutanan	9.732.846.000,00	8.509.172.383,00	1.223.673.617,00	87,43
	Belanja Pegawai	690.390.400,00	654.224.900,00	36.165.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.490.401.600,00	7.319.954.483,00	1.170.447.117,00	
	Belanja Modal	552.054.000,00	534.993.000,00	17.061.000,00	
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.005.133.000,00	9.144.763.790,00	2.860.369.210,00	76,17
	Belanja Pegawai	449.992.400,00	416.117.850,00	33.874.550,00	
	Belanja Barang dan Jasa	11.231.110.600,00	8.411.789.500,00	2.819.321.100,00	
	Belanja Modal	324.030.000,00	316.856.440,00	7.173.560,00	
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.110.676.500,00	26.061.698.504,06	1.048.977.995,94	96,13
	Belanja Pegawai	2.596.674.400,00	2.554.154.400,00	42.520.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	17.621.720.231,00	16.752.090.739,00	869.629.492,00	
	Belanja Modal	6.892.281.869,00	6.755.453.365,06	136.828.503,94	
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.637.764.000,00	9.956.619.914,00	681.144.086,00	93,60
	Belanja Pegawai	663.794.400,00	663.794.400,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000.350,00	7.398.531.514,00	601.468.836,00	
	Belanja Modal	1.973.969.250,00	1.894.294.000,00	79.675.250,00	
Jumlah Belanja Langsung		1.825.339.129.976,09	1.663.653.991.141,97	161.685.138.834,12	91,14
	Belanja Pegawai	135.534.769.782,31	110.902.567.956,00	24.632.201.826,31	81,83
	Belanja Barang dan Jasa	859.778.165.581,78	759.990.416.195,08	99.787.749.386,70	88,39
	Belanja Modal	830.026.194.612,00	792.761.006.990,89	37.265.187.621,11	95,51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data sementara)

Uraian target dan realisasi belanja langsung atas program dan kegiatan per SKPD Tahun 2015 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dari LKPJ Gubernur Tahun 2015.